**SKRIPSI**

**PERANAN BAPPEDA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA PADANG**

****

**Disusun oleh :**

**REGO SYOFTIKA PUTRA**

**1610012111032**

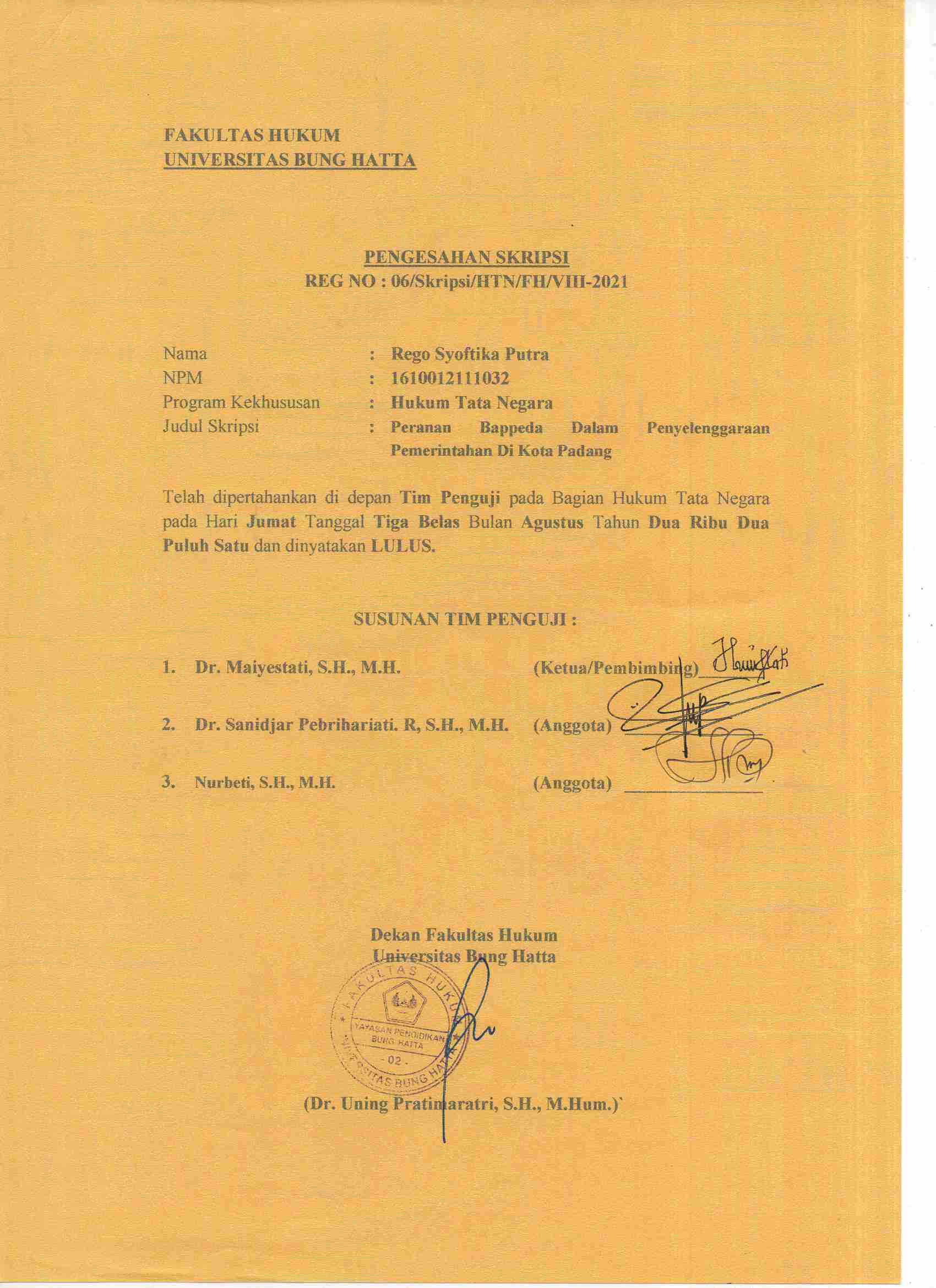
**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

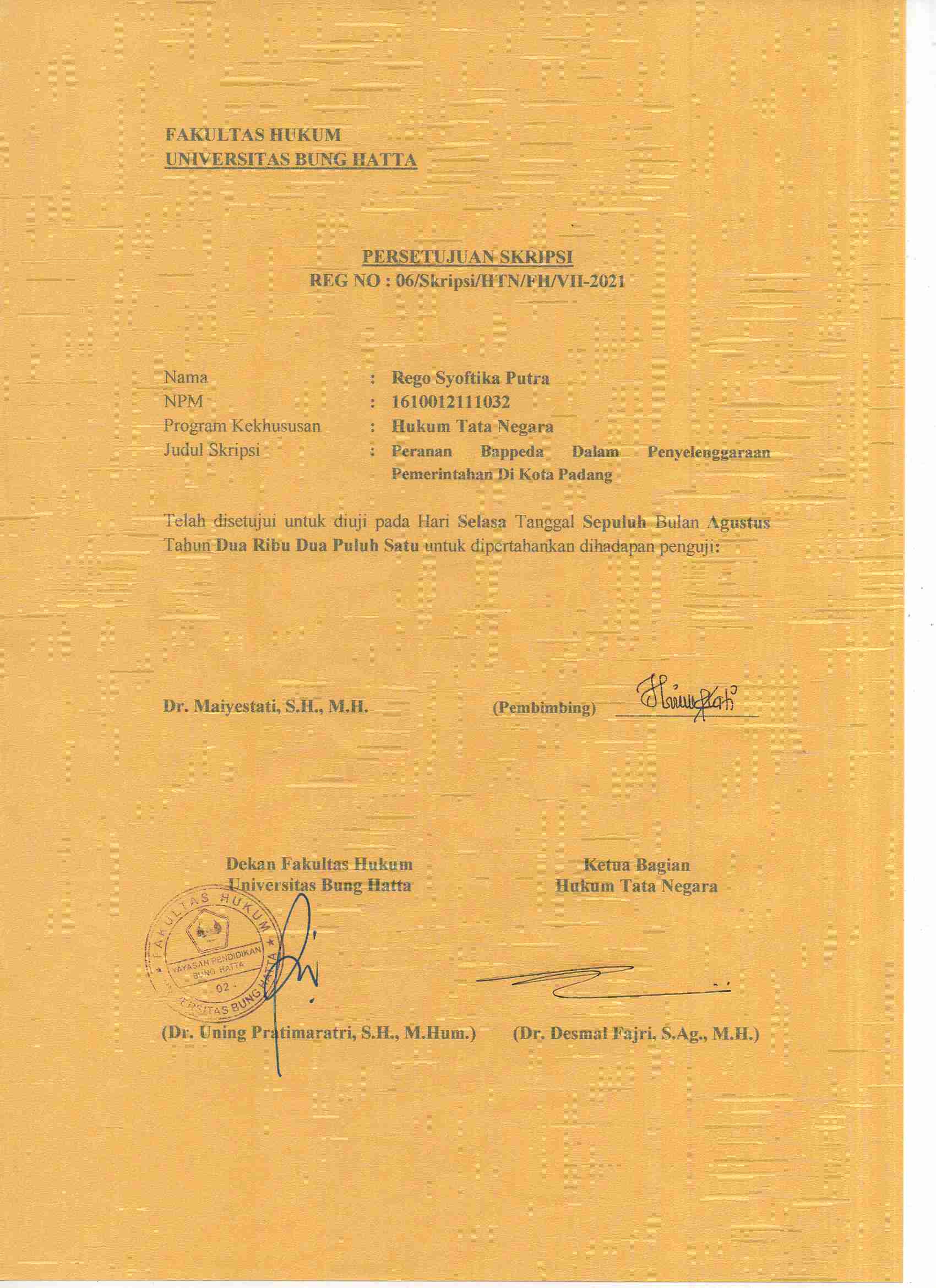
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2021**

****

****

**PERANAN BAPPEDA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA PADANG**

Rego Syoftika Putra1 Maiyestati 1  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bunghatta  
Email: [Regosyoftika@gmail.com](mailto:Regosyoftika@gmail.com)

***ABSTRAK***

Pembangunan adalah suatu proses modernitas yang tersadar dan terencana untuk menuju perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.Sebagai contoh pembangunan akan suatu desa yang masih tertinggal terhadap pembangunannya seperti jalan yang masih jelek dan untuk itulah peran dari bappeda dipertanyakan agar terciptanya pembangunan yang merata terutama di Kota Padang sebagaimana tugas dan fungsi dari bappeda Kota Padang diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 88 Tahun 2016. Rumusan masalah adalah 1) Bagaimana Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Padang? 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Padang? Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data di analisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Bahwa Peranan Bappeda Kota Padang yaitu dalam perencanaan, koordinasi, monitoring, Evaluasi, penelitian dan pendataan, penelitian dan pelaksanaan proyek-proyek yang bekerjasama dengan pendonor(pemberi modal), perencanaan pengelolaan lingkung, perencanaan Tata Ruang 2)Faktor penghambat Bappeda dalam menjalankan tugasnya ada 2 yaitu baik secara internal maupun eksternal sedangkan faktor pendukungnya yaitu sudah memiliki sistem informasi perencanaan pebangunan sehingga proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi bisa dilaksanakan melalui sistem informasi perencanaan pembangunan.

**Kata Kunci :Peranan, Bappeda, Pemerintahan.**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menganugrahkan akal dan pikiran kepada manusia memberikan kekuatan kepada penulis untuk menjalankan

peran didunia ini terutama dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungan-Nya kepada kita semua sehingga bumi ini selalu dirahmati oleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita bersama. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW yang tiada duanya, dan telah menjadikan dunia ini terang benderang dengan hiasan ilmu pengetahuan dan akhlaknya yang agung, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dihari kiamat kelak. Segala pujian bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepadapenulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PERANAN BAPPEDA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA PADANG”**

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada henti kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, saran, nasehat dan bimbingan dari Ibuk Dr. Maiyestati, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I ,yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H., selaku wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.H, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telahmemberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagipenulis.
5. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hattayang telah memperlancar jalannya administrasi.

Dan tidak lupa penulis juga memberi penghargaan dan berterima kasih atas dukungan, bantuan dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skipsi yaitu untuk:

1. Teristimewa dan tercinta untuk kedua orang tua, kepada Ibunda Istikawati dan Papa Syofrion M dan keluarga yang tidak pernah berhenti mendoakan yang terbaik untuk penulis dan memberikan nasehat, bimbingan serta dukungan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Teruntuk teman-teman seperjuangan dalam menulis sehingga penulis giatuntuk bimbingan serta dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dan mengarah ke arah yang lebih baik lagi.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

Padang, Agustus 2021

Penulis

Rego Syoftika Putra

**DAFTAR ISI**

**ABSTRAK** i

**KATA PENGANTAR** ii

**DAFTAR ISI** v

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang 1  
B. Rumusan Masalah 3  
C. Tujuan Penelitian 3  
D. Metode Penelitian 3

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Tentang Pengertian Peranan, Pemerintah

dan Pemerintahan 6  
B. Tinjauan Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8  
C. Tinjauan Tentang Pembangunan Daerah 12

**BAB III HASIL PENELITIANDAN PEMBAHASAN**

A. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Padang 17

B. Faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Padang 53

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan 58

B.Saran 59

**DAFTAR PUSTAKA**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan disegala aspek bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea ke empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan selurh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan merupakan suatu proses modernitas yang tersadar dan terencana untuk menuju perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan merupakan upaya nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena sifat hakiki manusia adalah makhluk multidimensional, maka pembangunan nasional menjadi wadah terakumulasinya berbagai program pembangunan yang berasal dari pembangunan daerah.[[1]](#footnote-2) Agar pembangunan dapat terencana dengan baik maka perlu adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Arah pembangunan yang baik sangat perlu adanya peran dan partisipasi dari masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu pembangunan di Indonesia mengalami kegagalan pembangunan di Indonesia krisis sosial yang melanda Indonesia hingga saat ini bukan terjadi begitu saja, melainkan suatu proses panjang yang melibatkan seluruh stake holders.[[2]](#footnote-3) Dapat dikatakan, krisis yang terjadi hingga saat ini merupakan wujud nyata dari kegagalan pembangunan. Kegagalan pembangunan tidak hanya disebabkan oleh kacau pelaksanaan pembangunan di lapangan, melainkan di mulai dari hulunya.

Upaya pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan daerah kota Padang dengan menetapkan peraturan mengenai pembentukan badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Padang sebagai perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.Oleh karena itu maka dengan adanya pembentukan badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Padang sangat diperlukan keberadaannya untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan secara merata dan adil dengan otonomi yang seluas-luasnya, untuk itu pemerintah mengupayakan agar pembangunan tersebut dapat berjalan semaksimal mungkin tanpa ada hambatan, karna kalau tidak ada BAPPEDA akan menyulitkan dalam proses pembangunan daerah Kota Padang, karna disinilah dituntut peran dari Bappeda agar perencanaan pembangunan daerah yang direncakan oleh Bappeda dimulai dari tingkat desa/ kelurahan sampai kecamatan dapat terlaksanakan, seperti contohnya pembangunan/perbaikan jalan-jalan desa yang masih belum memadai dan pembangunan lainnya yang berguna bagi masyarakat Kota Padang.

Untuk itu peranan BAPPEDA saat penting dan juga sebagai wadah dalam mendesain perencanaan dan penganggaran menjadi lebih baik dan benar, yang akan dituangkan dalam APBD Kota setiap tahun menjadi kunci utama dan ini menjadi tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Padang. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERANAN BAPPEDA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA PADANG”.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Padang ?

2. Apa sajafaktor pendukung dan penghambat yang di hadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Padang ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisaPeranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kota Padang.

2. Untuk menganalisafaktor pendukung dan penghambat yang di hadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Padang.

**D. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau penelitian terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum[[3]](#footnote-4). Disamping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau dari lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas,pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*Interview)* ke kantor BAPPEDA Kota Padang.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.[[4]](#footnote-5) Sumber dari sekunder adalah literatur, laporan penelitian, artikel, media massa, undang-undang, atau peraturan, dan bahan-bahan pustaka serta dokumentasi lainnya yang akan diperoleh dilapangan maupun kepustakaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri dari undang-undang, buku-buku, artikel, jurnal, dan lain-lain.

b. Wawancara

Untuk mendapatkan data primer, Data primer didapat dengan melakukan wawancara terhadap responden, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab bapak Syukri Hamdi, ST, selaku staf di kantor Bappeda Kota Padang pada bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah, diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.[[5]](#footnote-6)

**BAB II**

**Tinjauan Pustaka**

**A. Pengertian Peranan, Pemerintah dan Pemerintahan**

1. Pengertian Peranan

Dalam kamus bahasa indonesia kata “peranan” diartikan sebagai bagian dari tugas yang harus dilaksanankan[[6]](#footnote-7). Rony Hanitiyo menyatakan bahwa keseluruhan kewajiban-kewajiban yang menentukan kedudukan sosial seseorang secara kolektif disebut peranan dan keseluruhan hak-hak dinamakan kedudukan.[[7]](#footnote-8) Kewajiban merupakan “role”/peranan imperatif karena tidak boleh tidak dilaksanakan. Hak adalah peranan yang fakultatif sifatnya karenan boleh tidak dilaksanakan. Peranan tersebut kerap kali disebut kewenangan. Subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban artinya subjek hukum mempunyai:

1. Peranan yang harus dilaksanakan
2. Peranan yang tidak harus dilaksanakan

Peranan yang harus dilakukan itu disebut juga tugas atau kewajiban, sedangkan yang tidak harus dilakukan disebut wewenang atau hak.Dengan demikian yang dimaksud peranan Bappeda adalah bukan semata-mata dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban tetapi bagaimana perannya pelaksanaan hak-hak dan kewajiban Bappeda yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan

Secara etimologi, maka pengertian pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh (2 pihak yaitu yang memerintah dan yang diperintah).

b. Pemerintah (Pe) berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah

c. Pemerintahan (akhiran an) berarti perbuatan, cara atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Berdasarkan aspek statistika, maka “pemerintah” adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam aspek dinamika maka pemerintahan adalah kegiatan dari lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

Dalam artian yang sempit, pemerintahan adalah meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif saja (kalau menurut teori van vollenhoven, hanya meliputi “bestuur” saja). Sedangkan dalam arti luas, pemerintahan adalah meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, ekseksutif, maupun yudikatif.memiliki tujuan untuk mewujudkan negara.

Menurut Budiarjo pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.[[8]](#footnote-9)

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.[[9]](#footnote-10) Menurut Muhadam Labolo pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan.[[10]](#footnote-11)

Tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Dan pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama.[[11]](#footnote-12)

**B. Tinjauan Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

1. Pengertian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang di pimpin oleh seorang kepala badan daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. [[12]](#footnote-13)

Menurut Davidov dan Rainer yang di kutip dari Ateng Syafruddin, perencanaan dapat berarti : “Suatu Proses untuk menetapkan tindakan yang selayaknya dengan demikian pilihanpilihan yang tersediakan membentuk suatu proses perencanaan yang terdiri atas tiga macam peringkat : pertama, memilih tujuan dan syarat-syarat, kedua, mengenai seperangkat alternatif yang bersifat konsisten dengan ketentuan-ketentuan umum tersebut serta memilih sesuatu serta memilih suatu alternatif yang di kehendaki, ketiga mengarahkan tindakan-tindakan yang menuju kepda pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.[[13]](#footnote-14)

Begitupula dengan Surhayanto mengartikan pembangunan sebagai proes perubahan dari suatu kondisi tertentu ke kondisi yang lebih baik. Pembangunan juga dapat diartikan sebagai satu upaya teerkordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhui dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.[[14]](#footnote-15) Badan perencanaan pembangunan daerah di bentuk berdasarkan pertimbaangaan:

a. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.

b. Bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan didaerah, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, Terarah dan terpadu. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah ini disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu bentuk kesatuan sistem perencanaan nasional yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA).[[15]](#footnote-16)

Agar arah pembangunan dapat terencana dengan baik maka perlu adanya badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) dalam menjalankan perannya sesuai standar perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sehingga hasil pembangunan dari perencanaan tersebut dapat sesuai dengan target pembangunan yang telah ditetapkan. Masalah lain yang dianggap berpengaruh banyak terhadap kemampuan lembaga BAPPEDA dalam menjalankan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan secara optimal adalah kurangnya keterpaduan dan sinergi antarsektor, kurang terpadunya perencanaan dan penganggaran.[[16]](#footnote-17)

Dalam arti sempit perencanaan merupakan kaitan persiapan dalam perumusan kebijaksanaan, sedangkan dalam arti luas perencanaan itu mencakup perumusan kebijaksanaan , penetapan kebijaksanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut. Pemikiran demikian timbul dari adaanya bermacam teori perencanaan, yaitu: [[17]](#footnote-18)

a. Perencanaan menyatukan penyelidikan dengan penyelenggaraan dan membuat kedua-duanya berlangsung terus bersama-sama

b. Perencanaan merupakaan proses yang kontinu, karena administrasi darimana ia merupkan suatu bagian adalah dinamis.

c. Perencanaan membedakan antaraa yang konstan dan yang bervariasi dalam satu situasi

d. Harus berlangsung dalam pemikiran standar-standar yang meliputi tujuan-tujuan yang dirumuskan dengan tepat, kualitas dan cara-cara serta alat-alat penghasil yang bersifat teknologi yaang dirumuskan dengan tepat dan baik yang berupa manusia maupun yang berupa materi.

2. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kedudukan Bappeda adalah Bappeda merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah. Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintahan serta pembangunan yang sentralistik atau *top down* berubah menjadi suatu sistem yang desentralisasi. Dimana menurut Undang-undang tersebut daerah mempunyai kewajiban untuk mengatur daan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satunya kewajiban tersebut adalah mengurus dan mengatur masalah pembangunan. Dimana pembangunan merupakan proses perubahan dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik atau dari yang belum ada menjadi ada. Salah satu badan yang mempunyai peran sangat penting dalam perencanaan pembangunan adalah badan perencanaan pembaangunan daerah,dimana badan inilah yang akan membantu kepala daerah yang menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daeraah serta penilaian atas pelaksanaannya. Hal ini merupakan peranan yang sangat penting dalam setiap perencanaan pembangunan setiap daerah.

**C. Tinjauan Tentang Pembangunan Daerah**

1. Defenisi Pembangunan Daerah

Indonesia adalah negara berkembang dalam pelaksanaan pembangunan merupakan suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan pinsip daya guna yang merata dan berkeadilan, dalam hal tersebut dapat dikatakan bahwa pembangunan beriorentasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik.[[18]](#footnote-19)

Adanya pelaksanaan pembangunan adalah meningkatkan pendapatan nasional, sekaligus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan dan mewujudkan asas keadilan sosial. pembangunan daerah merupakan suatu peroses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.[[19]](#footnote-20)

2. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakaat dan mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya- sumberdaya yang ada harus mampu menaksir sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.[[20]](#footnote-21) Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. [[21]](#footnote-22)

Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah, dengan demikian ciri pokok pembangunan daerah adalah:

1). Meliputi seluruh aspek kehidupan

2). Dilaksanakan secara terpadu

3). Meningkatkan swadaya masyarakat.[[22]](#footnote-23)

3. Tujuan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan proyek-proyek penunjang daerah. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap-tahap desa swadaya dan swakarya dan memperhatikan keserasian pembangunan daerah pedesaan dan daerah perkotaan, imbangan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antara program sektoral atau regional dengan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan diseluruh indonesia.[[23]](#footnote-24)

4. Perencanaan Pembangunan Wilayah

Perencanaan pembangunan adalah teknik atau jasa untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah dirumuskan oleh badan perencanaan pusat. Dalam pembangunan baik di bidang ekonomi maupun segala bidang, sebaiknya ada sebuah perencanaan pembangunan supaya pembangunan lebih lancar dalam pelaksanaannya. Dalam perencanaan terdapat pengarahan kegiatan, yang dapat digunakan untuk perkiraan potensi, prospek hambatan, serta resiko yang mungkin dihadapi di masa mendatang.[[24]](#footnote-25) Perencanaan pembangunan ditandai dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan tertentu. Inilah yang membedakan perencanaan pembangunan dengan perencanaan-perencanaan yang lain. Ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

a. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap (steady social economic growth). Hal ini ditunjukan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif.

b. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.

c. Usaha untuk mengadakan perubahan stuktur ekonomi. Hal ini seringkali disebut sebagai usaha diversifikasi ekonomi.

d. Usaha perluasan kesempatan kerja.

e. Usaha pemerataan pembangunan sering disebut sebagai distributive justice.

f. Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.

g. Usaha secara terus-menerus menjaga stabilitas ekonomi.[[25]](#footnote-26)

Arsyad menyatakan fungsi-fungsi perencanaan pembangunan secara umum adalah:

a. Dengan perencanaan, diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan.

b. Dengan perencanaan, dapat dilakukan suatu perkiraan potensi-potensi, prospek-prospek pengembangan, hambatan, serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.

c. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.

d. Dengan perencanaan, dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.[[26]](#footnote-27)

**BAB III**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Padang.**

Peranan Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Padang, tidak terlepas dari peran serta pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama serta konsitensi dalam melaksanakan program kegiatan yang telah di rumuskan menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Bappeda Kota Padang menjadi salah satu perangkat daerah yang bertugas melaksanakan fungsi perencanaan dalam hal pembangunan daerah, wujud peranan bappeda dalam melaksanakan pembangunan dalam hal perencanaan tentu saja dapat dilihat beberapa aspek. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan peranannya, Bappeda Kota Padang melaksanakannya sesuai dengan tugas dengan fungsi yang telah di tetapkan seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Data yang di himpun melalui wawancara terhadap pejabat-pejabat di BAPPEDA Kota Padang dapat dijabarkan sebagai berikut:

**1. Struktur Organisasi Kota Padang Beserta Tugas dan Fungsinya**

Struktur organisasi BAPPEDA Kota Padang terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Badan, 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang dan 13 (tiga belas ) orang Kasubag/Kasubid[[27]](#footnote-28)..

Adapun deskripsi kerja masing-masing adalah sebagai berikut : Sekretariat, mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Di samping tugas pokok tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai:

1 Pengelolaan ketatausahaanBadan;

2 Pelaksanaan urusan kepegawaianBadan;

3 Pelaksanaan urusan keuanganBadan;

4 Pelaksanaan urusan perlengkapanBadan;

5 Pelaksanaan urusan umum dan rumah tanggaBadan;

6 Pelaksanaan koordinasi perumusan program kerja dan rapat kerjaBadan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian, melaksanakan urusan rumah tangga Badan, melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan aset Badan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan barang. Dalam melaksanakan tugas, sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
2. Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, serta mendistribusikan surat sesuaibidang;
3. Melaksanakan urusan kerumahtanggaanBadan;
4. Melaksanakan usul kenaikan pangkat danpensiun;
5. Melaksanakan usul kenaikan gaji berkala dan tugasbelajar;
6. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkupBadan;
7. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasimeliputibidang kepegawaian, pelayanan, organisasi danketatalaksanaan;
8. Menyusun rencana dan program kerja sesuai tugas danfungsinya;
9. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit(RKBU);
10. Membuat daftar kebutuhan barang(RKB);
11. Membuat Rencana Tahunan Barang Unit(RTBU)
12. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan barangBadan;
13. Menerima dan meneliti semua pengadaan pada lingkupBadan;
14. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventarisBadan;
15. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidangtugasnya;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olehatasan;
17. Menyusun laporan hasil pelaksanaantugas.

Sub Bagian Keuangan, memiliki tugas pokok menyusun rencana kerja serta melaksanakan tugas teknis keuangan.Dalam melaksanakan tugas, sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun rencana dan program kerja sesuai tugas danfungsinya;
2. Mengumpulkan Rencana Kerja Anggaran (RKA)Badan;
3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing satuan kerja sebagai bahan konsultasiperencanaan;
4. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaanBadan;
5. Menyusun neraca keuanganBadan;
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaantugas.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas penyusunan perencanaan dan pelaporan lingkup Badan. Dalam melaksanakan tugas, sub bagian perencanaan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :

1. Mengkoordinasikan program dan kegiatan unit-unit kerja lingkupBadan;
2. Melaksanakan Pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan, Daftar Usulan kegiatan (DUK) pada masing-masingbidang;
3. Menyusun rencana dan program kerja sesuai tugas dan fungsinya unit- unit kerja Badan(RENJA);
4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiBadan;
5. Mengumpulkan bahan Perjanjian Kinerja InstansiBadan;
6. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRABadan;
7. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan evaluasi terhadap RENJA;
8. Menyusun laporan hasil pelaksanaantugas.

Bidang yang berada dalam struktur BAPPEDA Kota Padang yaitu:

1 Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi

2 Sub Bidang Keuangan, Penanaman Modal danPariwisata

3 Sub Bidang Pangan, Pertanian danPerikanan

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyusun rencana dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam meliputi bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal, Pariwisata, Pertanian, Peternakan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas, bidang ekonomi dan sumber daya alam menyelenggarakan fungsi:

1. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD BidangEkonomi dan Sumber DayaAlam;
2. Menverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi danSumber DayaAlam;
3. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber DayaAlam;
4. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Ekonomi dan Sumber DayaAlam;
5. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber DayaAlam;
6. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkaitAPBD Bidang Ekonomi dan Sumber DayaAlam;
7. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Ekonomi dan Sumber DayaAlam;
8. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di Kab/Kota Bidang Ekonomi dan Sumber DayaAlam;
9. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Ekonomi dan Sumber DayaAlam;
10. Melaksanakan pengendalian/ monitoring Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber DayaAlam;
11. Melaksanakan Pengelolaan Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber DayaAlam;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber DayaAlam;
13. Pengelolaan administrasi urusantertentu.

Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi mempunyai tugas menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisas program pembangunan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Tenaga Kerja. Dalam melaksanakan tugas, sub bidang perdagangan, perindustrian dan koperasi mempunyai fungsi :

1. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD pada lingkup bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, tenagakerja;
2. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah pada lingkup bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, TenagaKerja;
3. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD pada lingkup bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, TenagaKerja;
4. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah danRPJMD pada lingkup bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, TenagaKerja;
5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kab/Kota pada lingkup bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, TenagaKerja;
6. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD pada lingkup bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, TenagaKerja;
7. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD pada lingkup bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, TenagaKerja;
8. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota pada lingkup bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, TenagaKerja;
9. Merencanakan Dukungan pelaksanaa kegiatan Pusat, Provinsi pada lingkup bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Tenaga Kerja;
10. Merencanakan Pengendalian / Monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, TenagaKerja;
11. Melaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada lingkup bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, TenagaKerja;
12. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, TenagaKerja;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olehatasan;
14. Menyusun laporan hasil pelaksanaantugas.

Sub Bidang Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisatamempunyai tugas menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa program pembangunan bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal, Pariwisata.Dalam melaksanakan tugas, sub bidang keuangan, penanaman modal dan pariwisata mempunyai fungsi :

1. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD pada lingkup bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal, Pariwisata sebagai bahan acuan dalam melaksanakantugas;
2. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah pada lingkup bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal,Pariwisata;
3. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD pada lingkup bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal,Pariwisata;
4. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD pada lingkup bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal,Pariwisata;
5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kab/Kota pada lingkup bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal,Pariwisata;
6. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD pada lingkup bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal,Pariwisata;
7. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD pada lingkup bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal, Pariwisata;
8. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota pada lingkup bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal,Pariwisata;
9. Merencanakan Dukungan pelaksanaa kegiatan Pusat, Provinsi pada lingkup bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal,Pariwisata;
10. Merencanakan Pengendalian / Monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal,Pariwisata;
11. Melaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada lingkup bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal,Pariwisata;
12. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal,Pariwisata;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olehatasan;
14. Menyusun laporan hasil pelaksanaantugas.

Sub Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas, sub bidang pangan, pertanian dan perikanan mempunyai fungsi :

1. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD meliputi bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan sebagai bahan acuan dalam melaksanakantugas;
2. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah meliputi bidang Pangan, Pertanian, Peternakan danPerikanan;
3. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD meliputi bidang Pangan, Pertanian, Peternakan danPerikanan;
4. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah danRPJMD meliputi bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kab/Kota meliputi bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
6. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD meliputi bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
7. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD meliputi bidang Pangan, Pertanian, Peternakan danPerikanan;
8. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota meliputi bidang Pangan, Pertanian, Peternakan danPerikanan;
9. Merencanakan Dukungan pelaksanaa kegiatan Pusat, Provinsi meliputi bidang Pangan, Pertanian, Peternakan danPerikanan;
10. Merencanakan Pengendalian / Monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah meliputi bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
11. Melaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
12. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah meliputi bidang Pangan, Pertanian, Peternakan danPerikanan;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olehatasan;
14. Menyusun laporan hasil pelaksanaantugas.

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan di Bidang Sosial Budayadan Pemerintahan Umum meliputi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk dan Capil, Trantibum, Kesbangpol, Setwan, Setda, Pengawasan, Kepegawaian, Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, dan Kearsipan.Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum menyelenggarakanfungsi:

1. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Sosial Budayadan PemerintahanUmum;
2. Menverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial Budayadan PemerintahanUmum;
3. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial Budayadan PemerintahanUmum;
4. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial Budayadan PemerintahanUmum;
5. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial Budayadan PemerintahanUmum;
6. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkaitAPBD Bidang Sosial Budayadan PemerintahanUmum;
7. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Sosial Budayadan PemerintahanUmum;
8. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di Kab/Kota Bidang Sosial Budayadan PemerintahanUmum;
9. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Sosial Budayadan PemerintahanUmum;
10. Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum;
11. Melaksanakan Pengelolaan Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial Budayadan PemerintahanUmum;
13. Pengelolaan administrasi urusantertentu.

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa program-program pembangunan meliputi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk dan Capil.Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

1. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD yang meliputi lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk danCapil;
2. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang meliputi lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk danCapil;
3. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD yang meliputi lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk danCapil;
4. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD yang meliputi lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk danCapil;
5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang PemberdayaanPerempuandan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk dan Capil;
6. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD yang meliputi lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk danCapil;
7. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD yang meliputi lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk danCapil;
8. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk danCapil;
9. Merencanakan Dukungan pelaksanaa kegiatan Pusat, Provinsi yang meliputi lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk danCapil;
10. Merencanakan Pengendalian / Monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk danCapil;
11. Melaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk danCapil;
12. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi lingkup bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Sosial, Adminduk danCapil;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olehatasan;
14. Menyusun laporan hasil pelaksanaantugas.

Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa program- program pembangunan meliputi bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat (Dewan dan Daerah) Pengawasan, dan Kepegawaian.Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur menyelenggarakanfungsi:

1. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD yang meliputi lingkup bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat (Dewan dan Daerah) Pengawasan, dan Kepegawaian sebagai bahan acuan dalam melaksanakantugas;
2. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang meliputi lingkup bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat (Dewan dan Daerah) Pengawasan, danKepegawaian;
3. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD yang meliputi lingkup bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat (Dewan dan Daerah) Pengawasan, danKepegawaian;
4. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD yang meliputi lingkup bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat (Dewan dan Daerah) Pengawasan, danKepegawaian;
5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat (Dewan dan Daerah) Pengawasan, danKepegawaian;
6. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD yang meliputi lingkup bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat (Dewan dan Daerah) Pengawasan, danKepegawaian;
7. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD yang meliputi lingkup bidang Ketentraman, Ketertiban UmumdanPerlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat (Dewan dan Daerah) Pengawasan, danKepegawaian;
8. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat (Dewan dan Daerah) Pengawasan, danKepegawaian;
9. Merencanakan Dukungan pelaksanaa kegiatan Pusat, Provinsi yang meliputi lingkup bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat (Dewan dan Daerah) Pengawasan, danKepegawaian;
10. Merencanakan Pengendalian / Monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi lingkup bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat (Dewan dan Daerah) Pengawasan, danKepegawaian;
11. Melaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi lingkup bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat (Dewan dan Daerah) Pengawasan, danKepegawaian;
12. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi lingkup bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat (Dewan dan Daerah) Pengawasan, dan Kepegawaian;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olehatasan;
14. Menyusun laporan hasil pelaksanaantugas.

Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kebudayaan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa program-program pembangunan meliputi bidang Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, dan Kearsipan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

* 1. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD yang meliputi lingkup bidang Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, dan Kearsipan sebagai bahan acuan dalam melaksanakantugas;
  2. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang meliputi lingkup bidang Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, danKearsipan;
  3. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD yang meliputi lingkup bidang Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, danKearsipan;
  4. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD yang meliputi lingkup bidang Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, danKearsipan;
  5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, danKearsipan;
  6. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD yang meliputi lingkup bidang Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, danKearsipan;
  7. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD yang meliputi lingkup bidang Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, danKearsipan;
  8. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, danKearsipan;
  9. Merencanakan Dukungan pelaksanaa kegiatan Pusat, Provinsi yang meliputi lingkup bidang Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, danKearsipan;
  10. Merencanakan Pengendalian / Monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi lingkup bidang Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, dan Kearsipan;
  11. Melaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi lingkup bidang Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, danKearsipan;
  12. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi lingkup bidang Kebudayaan, Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, danKearsipan;
  13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olehatasan;
  14. Menyusun laporan hasil pelaksanaantugas.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang meliputi bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Perumahan, Pemadam Kebakaran, Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian dan Perhubungan, Penataan Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :

1. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan PengembanganWilayah;
2. Menverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan PengembanganWilayah;
3. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan PengembanganWilayah;
4. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan PengembanganWilayah;
5. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan denganDPRDterkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan PengembanganWilayah;
6. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan PengembanganWilayah;
7. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota bidang Infrastruktur dan PengembanganWilayah;
8. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di Kab/Kota Bidang Infrastruktur dan PengembanganWilayah;
9. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Infrastruktur dan PengembanganWilayah;
10. Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaanperencanaanpembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan PengembanganWilayah;
11. Melaksanakan Pengelolaan Data dan informasiperencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan PengembanganWilayah;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaanpembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan PengembanganWilayah;
13. Pengelolaan administrasi urusantertentu.

Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan data, mengolah, menganalisa program-program pembangunan yang meliputi bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Perumahan, dan Pemadam Kebakaran.Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Infrastruktur menyelenggarakanfungsi:

1. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD yang meliputi lingkup bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Perumahan, dan PemadamKebakaran;
2. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang meliputi lingkup bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Perumahan, dan Pemadam Kebakaran;
3. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD yang meliputi lingkup bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Perumahan, dan Pemadam Kebakaran;
4. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD yang meliputi lingkup bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Perumahan, dan PemadamKebakaran;
5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Perumahan, dan PemadamKebakaran;
6. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD yang meliputi lingkup bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Perumahan, dan PemadamKebakaran;
7. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD yang meliputi lingkup bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Perumahan, dan PemadamKebakaran;
8. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Perumahan, dan PemadamKebakaran;
9. Merencanakan Dukungan pelaksanaa kegiatan Pusat, Provinsi yang meliputi lingkup bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Perumahan, dan PemadamKebakaran;
10. Merencanakan Pengendalian / Monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi lingkup bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Perumahan, dan PemadamKebakaran;
11. Melaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi lingkup bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Perumahan, dan PemadamKebakaran;
12. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi lingkup bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Perumahan, dan PemadamKebakaran;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olehatasan;
14. Menyusun laporan hasil pelaksanaantugas.

Sub Bidang Perhubungan dan Komunikasi mempunyai tugas menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan, mengolah dan menganalisa program-program pembangunan yang meliputi bidang Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian dan Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Perhubungan dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

* 1. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD yang meliputi lingkup bidang Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian dan Perhubungan sebagai bahan acuan dalam melaksanakantugas;
  2. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang meliputi lingkup bidang Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian danPerhubungan;
  3. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD yang meliputi lingkup bidang Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian danPerhubungan;
  4. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD yang meliputi lingkup bidang Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian danPerhubungan;
  5. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian danPerhubungan;
  6. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD yang meliputi lingkup bidang Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian danPerhubungan;
  7. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD yang meliputi lingkup bidang Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian danPerhubungan;
  8. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota yang meliputi lingkup bidang Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian danPerhubungan;
  9. Merencanakan Dukungan pelaksanaa kegiatan Pusat, Provinsi yang meliputi lingkup bidang Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian danPerhubungan;
  10. Merencanakan Pengendalian / Monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi lingkup bidang Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian dan Perhubungan;
  11. Melaksanaan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi lingkup bidang Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian danPerhubungan;
  12. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi lingkup bidang Komunikasi dan Informatika, Penelitian dan Pengembangan, Statistik, Persandian danPerhubungan;
  13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olehatasan;
  14. Menyusun laporan hasil pelaksanaantugas.

**2. Tugas dan Peranan BAPPEDA Kota Padang dalam perannya dalam membangun Kota Padang.**

Pada daerah Kota Padang, mutu perencanaan yang dimainkan oleh BAPPEDA Kota Padang di dalam menjalankan seluruh tugas dan peran yang dibebankan kepadanya. Untuk melakukan analisis demikian, perlu dipahami terlebih dahulu seluruh tugas dan peran yang dibebankan kepada BAPPEDA kota Padang sebagai salah satu lembaga pemerintah. Tugas dan Peranan BAPPEDA yaitu perencanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan penelitian dan pendataan. Tata kerja tugas dan peranan tersebut adalah sebagai berikut:

**a. TATA KERJA TUGAS DAN PERANAN PERENCANAAN**

Salah satu tugas dan peranan Bappeda dalam bentuk rencana adalah menyusun pola dasar pembangunan daerah, dilakukan dari bulan April sampai bulan Agustus dan rencana pembangunan 5 Tahun daerah dilakukan dari bulan Mei sampai bulai Maret. Kedua bentuk rencana ini dilakukan oleh Bappeda bersama-sama dengan perguruan tinggi terdekat, dan Departemen teknis. Sementara itu, rencana yang menjabarkan Repilitada, yakni program-program tahunan yang tertuang dalam RAPBD, penampilan Bappeda teruju, seberapa besar otoritasnya di hadapan dinas dinas daerah dan instansi lainnya, seberapa jauh kewenangan dalam merencanakan pembangunan daerah diakui dan dihormati oleh dinas dan instansi, seberapa tinggi kemampuan meyakinkan walikota dan seberapa besar pengakuaan yang diberikan oleh DPRD kepadanya. Penjelasan lebih rinci mengenai hal tersebut dipaparkan di bawah ini.

Rencana dari bawah (bottom-up planning) dimulai perumusan rencana pembangunan oleh Desa melalui musyawarah Lembaga ketahanan Masyarakat Desa (LKHD), mengalir kekecamatan lewat diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), dan akhirnya bersama-sama dengan rencana yang disusun oleh Dinas dan Instansi digodog di forum musyawarah rencana pembangunan (musrembang) pada bulan Juni dan Pada tahap di forum musyawarah rencana pembangunan itulah BAPPEDA mulai berperan, dalam yang sudah diprogram BAPPEDA itu sesuai dengan program yang sudah ditentukan Bappeda atau kebijakan/program pemerintah daerah sudah ada di Bappeda.

Setelah usulan rencana pembangunan dari Bappeda ditambah dengan usulan kepala dinas, instansi pemerintah dalam lingkungan daerah diterima, Bappeda menyusun draft Daftar Rencana Usulan Proyek(DRUP). Draft FRUP ini dibahas bersama-sama oleh semua pengusul rencana(Bappeda, Dinas dan Instansi) dalam forum Musrembang pada bulan juni,juli, Agustus, untuk kemudian di tetapkan sebagai Daftar Usulan Proyek(DUP). DUP digunakan oleh kepala daerah menyusun RAPBD maupun untuk mengusulkan proyek-proyek pembangunan kepada pemerintah Pusat. Pada umumnya konsep DRUP disusun bersama-sama dengan Biro keuangan, dan Dirjen pembangunan untuk memberikan arahan-arahan.

Untuk menutup bagian ini, dapat dikemukakan bahwa Bappeda merumuskan hasil Musrembang yang membahas draft Rencana Usulan Proyek(DRUP) menjadi daftar usulan proyek(DUP). DUP ini diajukan kepada kepala daerah, diolah menjadi RAPBD oleh Bappeda bersama-sama dengan bagian keuangan dan bagian Pembangunan, untuk nantinya dibahas bersama DPRD dan di tetapkan sebagai APBD.

Di dalam perencanaan pembangunan Daerah, Bappeda berperan sampai pada tahap penyusunan DRUP, sementara itu dalam menentukan anggaran atau dana untuk tiap-tiap proyek pada umumnya bagian keuangan yang dominan. Meskipun Bappeda dilibatkan juga dalam tim anggaran, bersama-sama dengan Bagian Keuangan, bagian Pembangunan dan Dinas Pendapatan daerah, akan tetapi Bagian Keuanganlah yang menentukan plafon anggaran. Dalam Tim ini Bappeda pada umumnya menunjukan proyek apa yang diutamakan dan proyek apa yang dinomorduakan, sesuai dengan rencana Pembangunan 5 Tahun Daerah dan Pola Dasar dan sumber dana dari tiap-tiap proyek.

Di dalam proses perencanaan pembangunan seperti dalam peraturan mentri dalam negeri No.86 Tahun 2017, Bahwa Bappeda pada umumnya telah melakukan tugas dan peranannya. Tugas dan peranan Bappeda sebagai perencana pembangunan daerah tampaknya telah dipahami oleh hampir semua instansi di daerah, dan Bappeda sendiri menyadari tugas dan wewenangnya itu, keterlibatan Bappeda dalam proses perencanaan ini dimulai dari rapat koordinasi pembangunan hingga penetuan proyek (yang tertuang dalam APBD).

Koodinasi terhadap proyek pembangunan yang dikelola oleh dinas-dinas Daerah, organisasai di lingkungan pemerintah Daerah, pada umumnya mudah dilakukan oleh Bappeda. Eselon Ketua Bappeda yang lebih tinggi di bandingkan kepala dinas itu merupakan kondisi yang membantu pelaksanaan tugas dan wewenang koordinasi.

Cara Bappeda melakukan koodinasi terhadap instansi pemerintah dengan cara Bappeda mengirimkan blangko isian ke setiap instansi untuk membuat usulan proyek mereka, kemudian setelah proyek berjalan Bappeda memanggil instansi1 kali dalam 1 bulan untuk melaporkan kegiatan proyeknya.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi perencanaan antara sektor dan antara program sektoral dan program regional/koordinasi horizontal dan koordinasi ertikal, proses dan mekanisme perencanaan pembangunan di daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu menurut surat mentri dalam negeri No.050/189/Bangda tanggal 10 Agustus 1981 yang diperjelas oleh surat mentri/wakil ketua Bappenas No.1799/wk/9/1981 tanggal 3 Desember 1981 serta petunjuk yang tertuang dalam peraturan Mentri Dalam Negeri No.9 Tahun 1982, dengan menerapkan sistem Botton up Planing dan Top down Planing.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa Bappeda mempunyai kegiatan tahunan. Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian mengenai proses dan mekanisme perencanaan pembangunan di daerah Kota Padang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1). Proyek Pembangunan Sektoral

1. Penyusunan Usulan rencana Proyek yang diajakukan kepada Departemen terlebih dahulu diadakan konsultasi dengan instansi lain yang ada kaitan fungsional dengan proyek tersebut.
2. Instansi pengelolaan proyek mengadakan konsultasi dengan Bappeda dan konsultasi dengan instansi/unit yang erat kaitannya dengan proyek yang diusulkan. Masalah yang dikonsultasikan menyangkut teknis perencanaan/DUP, sedangkan untuk instansi/unit menyangkut koordinasi.
3. Konsultasi dilaksanakan menurut jadwal yang sudah ditetapkan oleh Bappeda.
4. Pengusulan proyek memerlukan rekomendasi dari bappeda. Pada umumnya konsultasi merupakan prosedur untuk mengajukan permintaan rekomendasi dan untuk keterpaduan rencana pembangunan di Daerah, sebagai dasar pertimbangan pemberian permintaan rekomendasi itu.
5. Pengajuan usul proyek kepada departemen dilakukan atas inisiatif sendiri atau permintaan departemen.
6. Usulan proyek apabila perlu diperbaiki dikembalikan kepada pimpinan proyek, pimpinan proyek memperbaiki sesuai dengan koreksi yang kemudian dikirim kembali ke departemen yang bersangkutan.
7. Rencana DUP dikirim ke departemen berkisar pada bulan juni, Juli, Agustus dan September.
8. Rencana proyek dikirimkan ke departemen pada bulan Oktober, Nopember, dan Desember.
9. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai persiapan pelaksanaan proyek adalah mempelajari DIP dan PO, membuat rencana operasional proyek dan mempersiapkan dan melaksanakan pelelangan.

2). Proyek Pembangunan Daerah

1. Dalam rangka penyusunan usulan perencanaan proyek daerah, dinas-dinas atau unit-unit organisasi lainnya yang mengelola proyek maka pada umumnya penyusunan tersebut dilakukan pula melalui konsultasi-konsultasi dengan instanti yang ada kaitan fungsional dengan proyek itu.
2. Konsultasi dengan instansi yang secara fungsional terlibat dalam proyek yang diusulkan itu ialah dinas-dinas terhadap instansi dan Bappeda yang bersangkutan.
3. Konsultasi Bappeda dengan dinas-dinas, instansi dan unit organisasi lainnya dilangsungkan pada bulan juli, Oktober dan bulan Januari.
4. Usulan rencana proyek daerah dikonsultasikan oleh Bappeda, Biro Bina Penyusunan Proyek dan Biro keuangan daerah yang bersangkutan untuk ditetapkan anggarannya di dalam APBD.
5. Dasar pertimbangan persetujuan atas usulan rencana daerah adalah keterpaduan pembangunan antara daerah dengan sektoral dan antara daerah dengan daerah.
6. Pengajuan Usul Proyek Daerah dilakukan berdasaerkan inisiatif sendiri atas permintaan dari pemerintah daerah.
7. Rencana DUPDA disampaikan pada pemerintah daerah pada bulan Juni.
8. Rencana Proyek dituangkan ke dalam Daftar isian proyek daerah(DIPDA) pada bulan Januari.
9. DIPDA yang sudah disetujui disampaikan kepada semua pimpinan proyek dalam waktu bersamaan dalam suatu rapat.
10. Dalam rangka persiapan pelaksanaan proyek diadakan rapat pimpinan proyel, bendahara, dan pelaksana proyek untuk menyusun rencana operasional dan pedoman pelaksaanaan kegiatan.
11. Dalam perencanaan proyek disusun berdasarkan pola dasar pembangunan daerah, repelita daerah dan kebijaksanaan pemerintah daerah.

Kelemahan koordinasi dirasakan pada tahap evaluasi atau manfaat proyek. Untuk mengatasi keadaan ini Bappeda sebagai penguasa tunggal dalam pembangunan bekerjasama dengan bidang yang akan di evaluasi melakukan penelitian.

**b. TATAKERJA TUGAS DAN PERANAN MONITORING DAN EVALUASI**

Instansi-instansi membuat laporan pelaksanaan proyek-proyek sacara berkala. Bappeda Kota Padang memonitor pencapaian target yang mampu dilakukan oleh setiap proyek. Mengevaluasi hambatan yang dihadapkan dalam pelaksanaan proyek, dan juga mengevaluasi kesusaian proyek dengan relitada. Penyimpangan yang mungkin ditemui dan informasi yang didapat dalam monitoring akan dilaporkan kepada kepala daerah(walikota Padang).

Untuk melaksanakan wewenang monitoring di bentuk suatu team yang dinamakan “team monitoring”. Untuk proyek daerah anggota terdiri dari Bappeda, Biro Bina Penyusunan Program(BIPROM), dan Biro Keuangan. Untuk Proyek Daerah(Sumber dana dari APBD) anggota teamnya terdiri dari Bappeda, Biro Penyusunan Program dan Kanwil Dikjen Anggaran.

Team mengundang seluruh pimpinan pelaksana proyek membicarakan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana, kemajuan proyek sesuai pelaksanaan dengan rencana kemajuan proyek sesuai dengan target, dan apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Rapat monitoring dilaksanakan 6 kali dalam 1 Tahun atau 2 bulan sekali. Rapat dihadari oleh seluruh Kanwil/Dinas/instansi, seluruh pimpinan proyek dan bupati/walikota yang rapat tersebut dipimpin oleh walikota atau yang mewakili ketua Bappeda.

**c. TATAKERJA TUGAS DAN PERANAN PENELITIAN DAN PENDATAAN**

Tugas dan peranan penelitian dan pendataan secara interen telah dilaksanakan oleh Bappeda ketika melakukan perencanaan dan monitoring. Dalam kegiatan perencanaan dan monitoring Bappeda mengumpulkan (mendata) serta menganalisis informasi dan data. Hanya saja, penelitian dalam arti yang lebih sistematis, untuk informasi jangka panjang atau untuk keperluan pembangunan kebijaksanaan strategis, belum pernah dilakukan oleh Bappeda. Oleh karena itu wajar jika hingga sekarang Bappeda belum menjadi penyedia data yang baik bagi instansi di daerah.[[28]](#footnote-29)

Tugas dan peranan lain yang dilakukan oleh Bappeda di Kota Padang menyangkut proyek-proyek bekerjasama dengan pendonor(pemberi modal), Perencanaan Pengelolaan Lingkungan dan Perencanaan Tata Ruang.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Bappeda mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan (Kota Padang) karna Bappeda mempunyai/memegang tugas dan peran dalam proses pembangunan di kota padang seperti[[29]](#footnote-30) :

1. Perencanaan.
2. Koordinasi.
3. Monitoring.
4. Evaluasi.
5. Penelitian dan pendataan.
6. Penelitian dan pelaksanaan proyek-proyek yang bekerjasama dengan pendonor(pemberi modal).
7. Perencanaan Pengelolaan lingkung.
8. Perencanaan Tata Ruang.

**B. Faktor pendukung dan penghambatyang di hadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Padang**

Peranan bappeda terhadap pembangunan di kota Padang dilihat dari sejauh mana pelaksanaan fungsi bappeda sendiri serta bagaimana melaksanakan proses perumusan kebijakan teknis yang tercermin dalam proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan musrembang yang telah digaambarkan sebelumnya dalam hal proses perumusan kebijakan teknis, terdapat beberapa faktor-faktor yang berpengaruh, tidak bisa di pungkiri ada banyak hal yang bisa mempengaruhi proses pelaksanaan perumusan kebijakan tersebut, baik faktor-faktor yang mendukung maupun faktor-faktor penghambat berjalannya proses tersebut yang dapat diuraikan oleh bapak Hamdi bahwa:

“Faktor penghambat internal dalam menjalankan perannyaseperti yang saya ketahui yaitu:

1. masih minimnya SDM manusia sesuaikompeten di tempatkan dalam perangkat daerah kota Padang dimana jumlah pegawai Bappeda Kota padang Tahun 2021 berjumlah 94 orang, karna dengan jumlah pegawai sebanyak itu dibandingkan dengan bahan kerja yang terus meningkat, menurut jumlah tersebut belum mencukupi, karna secara rutin tugas Bappeda sudah terlalu banyak apalagi kalau saat-saat penyusunan anggaran pembangunan dimulai belum lagi pekerjaan lainnya, sebaiknya anggota Bappeda minimal 120 orang agar tercapainya kerja yang maksimal dan cepat.
2. Belum optimalnya SDM di bappeda mengoprasikan sistemperencanaan pembangunan daerah di kota Padang minimnyapengetahuan SDM di bappeda tentang perencanaan pengendaliandan evaluasi dimana jenjang pendidikannya terdiri dari :

TABEL I

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pendidikan | Jumlah |
| 1 | S2 | 21 |
| 2 | S1 | 57 |
| 3 | SMA | 16 |

karna alangkah baik perbandingan pendidikan di atas bagusnya berbanding terbalik karna sudah seharusnya pada jaman sekarang pendidikan harus lebih tinggi.

Adapun juga faktor penghambat eksternal yaitu:

1. Padaperangkat daerah SDM masih belum memahami proses perencanaanpengendalian dan pelaporan serta evaluasi perencanaan karna sama seperti penjelasan jenjang pendidikan di atas.
2. Untuk pelaporan masih dibuat secara manual belum dilakukan dengansistem perencanaan e-planning
3. Hambatan utama yang dihadapi oleh Bappeda dalam melaksanakan perencanaan adalah kekurangan data, rendahnya kemampuan dan keterampilan profesional staf, pola pengembangan karier yang tidak jelas, serta kekurangan dana dan sarana.
4. Penyesuaian / kesiapan anggaran kerangka anggaran yang mesti diperhatikan dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan, sehingga dalam pelaksanaannya pembagian alokasi dana terhadap rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan tidak terganggu.
5. Kurangnya dokumen–dokumen acara seperti misalnya forum musrembang daerah, pengadaan daftar permasalahan dan tantangan daerah, peta kemiskinan dan pengangguran serta hasil pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya.

Maka berdasarkan hambatan yang di alami dari bapepda kota Padang maka dari itu bappeda kota Padang mempunyai faktorpendukung juga yaitu:[[30]](#footnote-31)

1. Sudah memiliki sistem informasi perencanaanpembangunan (SIPPD) sehingga perencanaan pengendalian danevaluasi bisa dilaksanakan melalui SIPPD.
2. Kordinasi yang tepatantara perangkat daerah dan bappeda dalam proses perencanaanpengendalian dan evaluasi.”[[31]](#footnote-32)

Jadi dapat dirangkumkan dari hasil wawancara dari informan tersebut bahwa bappeda kota Padang juga mempunyai penghambat dan pendukung dalam menjalankan fungsinya yang pertama faktor penghambat internal dalam menjalankan perannya yaitu masih minimnya SDM manusia dan pengetahuan SDM sesuai kompeten di tempatkan dalam perengkat daerah kota Padang dimana SDM yang berjumlah 94 orang, dengan jenjang pendidikannya terdiri dari : S2 21 orang, S1 57 orang dan SMA 16 orang, yang kedua faktor penghambat eksternal pada perangkat daerah SDM masih belum memahami proses perencanaan, pengendalian dan pelaporan serta evaluasi perencanaan untuk pelaporaan masih menggunakan yang manual belum menggunakan sistem perencanaan e-planning. Maka dari itu faktor pendukung agar terealisasinya rencana pembangunan dikota Padang, Bappeda Kota Padang harus memenuhi dari kekurangan tersebut yaitu ketersediaan SDM yang memadai, ketersediaan sarana dan prasarana terpenuhi, ketersediaan anggaran, adanya kordinasi yang baik antara tim penyusun RKPD dengan tim penyusun APBD dan TAPD, tingkat kinerja tim penyusun RKPD dalam RENJA bappeda cukup baik, adanya kesesuaian kegiatan dokumen RENSTRA dengan dokumen RENJA SKPD, adanya kordinasi yang baik antara tim penyusun RENJA dengan tim penyusun DPA SKPD, adanya komitmen yang besar dari legislatif dan eksekutif untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Untuk faktor pendukung bappeda kota Padang sudah memiliki sistem informasi perencanaan pebangunan sehingga proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi bisa dilaksanakan melalui sistem informasi perencanaan pembangunan.

**BAB IV**

**PENUTUP**

**A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan antara lain :

1. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Padang mempunyai tugas dan fungsi sepertiperencanaan, koordinasi, monitoring, Evaluasi, penelitian dan pendataan, penelitian dan pelaksanaan proyek-proyek yang bekerjasama dengan pendonor(pemberi modal), perencanaan pengelolaan lingkung, perencanaan Tata Ruang.

2. Dalam proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, terdapat beberapa faktor-faktor yang berpengaruh, baikfaktor-faktor yang mendukung maupun faktor-faktor yang menghambatberjalannya proses tersebut. Faktor-faktor yaang menjadi pendukung antara lain adalahsudah memiliki sistem informasi perencanaan pebangunan sehingga proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi bisa dilaksanakan melalui sistem informasi perencanaan pembangunan.. Sedangkan yang menjadi faktor-faktorpenghambat faktor penghambat internal dalam menjalankan perannya yaitu masih minimnya SDM manusia dan pengetahuan SDM sesuai kompeten di tempatkan dalam perengkat daerah kota Padang dimana SDM yang berjumlah 94 orang, dengan jenjang pendidikannya terdiri dari : S2 21 orang, S1 57 orang dan SMA 16 orang, yang kedua faktor penghambat eksternal pada

perangkat daerah SDM masih belum memahami proses perencanaan, pengendalian dan pelaporan serta evaluasi perencanaan untuk pelaporaan masih menggunakan yang manual belum menggunakan sistem perencanaan e-planning

**B. Saran**

Sesuai dengan permasalahan yang ada penulis memberikan saran bahwa :

1. Agar penerapan perencanaan pembangunan dikota Padang dapat berjalan sebagai mana yang diharapkan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat , maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih serius dalam meningkatkan pendapatan daerahnya khususnya sektor pajak yang berperan penting dalam peningkatan asli daerah sehingga meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

2. Pemerintah hendaknya melibatkan seluruh pelaku usaha dalam proses perencanaan pembangunan untuk mencapai efektifnya perencanaan pembangunan dikota Padang, sehingga pola pelaksanaan perencanaan pembangunan kotaPadang dapat berjalan dengan baaik khususnya di kota Padang.

3. Apabila dalam pelaksanaan musrembang dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah maka hasilnya pasti baik, tetapi karna sikap tidak percaya masyarakat terhadap hasil pelaksanaan musrembang sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan di kota Padang tidak berjalan dengan baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-buku**

Amiruddin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Moh, Nazir. 2005, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.

Kuncoro, Mudrajad. 2018 .*Perencanaan Pembangunan: Teori dan Aplikasi*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Riyadi, dan Bratakusumah. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah Stategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Sjafrisal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Rajawali Pers. Jakarta.

Yusuf, A. Muri, 2001. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

**B**. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan .

**C. Sumber Lain**

Fahrizanur, Rita Kalalinggi dan H Burhanudin. 2020. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan Pembangunan di Daerah Kabupaten Paser. eJournal Ilmu Pemerintahan.

Sinta. 2021. Analisis Peranan Bappeda dalam Pembangunan di Kabupaten Jeneponto. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan. (dikutip dari http://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/issue/view/193)

Ilham dan Renyaan, 2021 Journal Pemerintahan Daerah, <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/view/929>

Setio Rini. 2017. *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Studi Di Kecamatan Samarinda Ulu*).Jurnal Administrasi Negara Volume 5, (Nomor 2) 2017: 5948-5961.

Soetomo, 2021, Journal Pembangunan Daerah, http://ejournal.bappeda.bantenprov.go.id/index.php/jkpd/issue/view/9

1. Rorano, Alva Martoms dan Masye S. Pangkey. 2013. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Halmahera Timur. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. (dikutip dari https://repository.unair.ac.id ) [↑](#footnote-ref-2)
2. Fahrizanur, Rita Kalalinggi dan H Burhanudin. 2017. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Perencanaan Pembangunan di Daerah Kabupaten Paser. eJournal Ilmu Pemerintahan. (dikutip dari https://repository.unair.ac.id ) [↑](#footnote-ref-3)
3. Bambang Sunggono, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 23. [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid* [↑](#footnote-ref-6)
6. Lukman Ali, ed, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan kebudayaan*, Balai Pustaka Jakarta. hlm.751. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ronny Hanitiyo Soemitri, 1985, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung. hlm.42 [↑](#footnote-ref-8)
8. Miriam Budiarjo, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm. 21. [↑](#footnote-ref-9)
9. Talizidhuhu Ndraha,2003, *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru),*Rineka Cipta, Jakarta hlm. 6. [↑](#footnote-ref-10)
10. Muhadam Labolo, 2007, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Kelapa Gading Permai, Jakarta. hlm. 24 [↑](#footnote-ref-11)
11. ibid [↑](#footnote-ref-12)
12. Kuncoro, Mudrajad. 2018 .*Perencanaan Pembangunan: Teori dan Aplikasi*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 12. [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid.* hlm.24 [↑](#footnote-ref-14)
14. Rorano dan Masya. 2020. Peranan Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Halmahera Timur. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. (dikutip dari https://repository.unair.ac.id ) [↑](#footnote-ref-15)
15. Sinta. 2021. Analisis Peranan Bappeda dalam Pembangunan di Kabupaten Jeneponto. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan.(dikutip dari http://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/ issue/ view/193) [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-17)
17. Yusuf, A. Muri, 2001. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 32. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ilham dan Renyaan, 2021 Journal Pemerintahan Daerah, http://jurnal.umpwr. ac.id/ index.php/amnesti/article/ view/ 929 Diakses Tgl 03-04-2021. [↑](#footnote-ref-19)
19. Ilham dan Renyaan, 2021 Journal Pemerintahan Daerah, <http://jurnal.umpwr.ac.id/> index.php/amnesti/article/view/929 Diakses Tgl 03-04-2021. [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid.* hlm. 41. [↑](#footnote-ref-21)
21. Sinta. 2021. Analisis Peranan Bappeda dalam Pembangunan di Kabupaten Jeneponto. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan. (dikutip dari http://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/issue/view/193) [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid.* hlm. 43. [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid.* hlm. 44. [↑](#footnote-ref-24)
24. Soetomo, 2021, Journal Pembangunan Daerah, <http://ejournal.bappeda.bantenprov.go>. id/index.php/jkpd/issue/view/9 Diakses Tgl 03-04-2021. [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-27)
27. Data diperoleh dari informan tentang struktur Bappeda Kota Padang [↑](#footnote-ref-28)
28. Wawancara dengan Syukri Hamdi, ST, selaku staf di kantor Bappeda Kota Padang pada bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah., 7 Juni 2021, Pukul 10.20 WIB [↑](#footnote-ref-29)
29. Wawancara dengan Syukri Hamdi, ST, selaku staf di kantor Bappeda Kota Padang pada bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, 7 Juni 2021, Pukul 10.30 WIB [↑](#footnote-ref-30)
30. Wawancara dengan Bapak Hamdi, 7 Juni 2021, Pukul 10.10 WIB [↑](#footnote-ref-31)
31. Wawancara dengan Bapak Hamdi, 7 Juni 2021, Pukul 10.20 WIB [↑](#footnote-ref-32)